

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA SURAKARTA

Oleh :

Novina Eky Dianti¹, Hartini²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta. Hal ini sangat menarik untuk di kaji karena pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di Surakarta dilakukan berdasarkan peraturan daerah khusus di Surakarta

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini yaitu normatif empiris dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang ditelaah melalui data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan Narasumber. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Studi Kasus (*Case Study*). Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis.

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta dilakukan sesuai dengan proses pencatatan perkawinan pada umumnya. Perbedaan pelaksanaannya adalah terkait pencantuman Penetapan Pengadilan Negeri yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama dikarenakan mengacu pada Pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan. Dari sinkronisasi horizontal dan vertikal terhadap semua peraturan perundang-undangan diketahui terdapat ketidaksinkronan antara pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Kata kunci : Perkawinan beda agama, Pencatatan, Sinkronisasi, Dispendukcapil, Penetapan Pengadilan.

¹ Jl.Dr Muwardi 3B Gayam. Sukoharjo

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**SYNCHRONIZATION OF REGULATION REGARDING INTERFAITH
MARRIAGE REGISTRATION IN SURAKARTA CITY**

By :
Novina Eky Dianti³, Hartini⁴

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation and synchronization regarding the implementation of regulation of interfaith marriage registration in Population and Civil Registration Agency of Surakarta. This subject is very interesting to examined because the implementation of interfaith marriage registration in Surakarta based on regional regulation of Surakarta.

This study is descriptive research. This type of research is empirical normative by literature and field research studied through primary data, secondary data and tertiary data. Primary data are data obtained through interviewing respondents and interviewees, while secondary data are obtained through literature research which source from primary, secondary and tertiary legal material. The research approach are the Statute Approach and Case Study. All data was analyzed qualitatively and presented in descriptive analysis form.

The result of this research stated that interfaith marriage's regulation in Department Population and Civil Registration of Surakarta conducted due to general process of marriage registration. The difference is related to the inclusion of Determination of the State Court to permitting interfaith marriage's registration caused refers the Article 35 Paragraph (a) law of Civil Administration. From the horizontal and vertical synchronization to the related laws and regulations, discovered that there are unsynchronized between Article 35 Paragraph (a) Law of Civil Administration and The Law of Marriage.

**Keyword : Interfaith Marriage, Registration, Synchronization, Department
Population and Civil Registration, Determination of State Court**

³ Dr. Moewardi St, Number 3B, Gayam, Sukoharjo

⁴ Faculty of Law Gadjah Mada University